



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021,

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk

mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.
12. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II

### POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 adalah untuk:
  - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
  - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
  - a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;

- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut; dan
  - c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 3

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

### BAB IV ASPEK PENGAWASAN

#### Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil;
- e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- h. pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- i. pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

## BAB V RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

### Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
  - b. aspek pengelolaan keuangan;
  - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - d. aspek pengelolaan barang daerah.
- (3) PKPT dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

### Pasal 6

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
  - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
  - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan

- d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
- a. penataan satuan kerja Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten;
  - d. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
  - e. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
  - f. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - g. pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;
  - h. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;

- i. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- k. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB VII OBJEK PENGAWASAN

### Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi:

- a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan; dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

### Pasal 8

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang;
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2021.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 9

Laporan PKPT terdiri dari:

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP); dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.



BAB X  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XI  
KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjend Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 10

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL (rencana penerbitan laporan Dana Risiko Audit)	Anggaran Biaya				Risiko Audit	Ket	Tanggal Pelaksanaan
										Hari	Orang	Tarif	Total			
1	2	3	4	5	6	7		8	9				10	11	12	13
1	Penyusunan PKPT			Perencanaan	2021	PJ, WPJ, PT, KT, AT	2	Januari minggu ke-1	Januari minggu ke-1					Tinggi	semua Irban	4 s/d 8 jan
2	Reviu DAK Fisik Bid. Pertanian	Assurance	Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 2 AT	5	Januari minggu ke-2	Januari minggu ke-3					Tinggi	Irban I	11 s/d 15 Jan
3	Reviu DAK fisik Bid. Kesehatan pelayanan dasar	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Januari minggu ke-4	Januari minggu ke-5					Tinggi	Irban III	25 s/d 29 Jan
4	Audit PKN	Assurance	RSUD H. Boejasin	Audit tujuan tertentu	2014 - 2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	9	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-3					Tinggi	Irban II	4 s/d 17 Feb
5	Reviu DAK fisik tahap akhir tahun 2020	Assurance	DPUPRP Bid. Irigasi, Bid. Sanitasi, Bid. Air Minum	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	11	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-3					Tinggi	Irban II	4 s/d 19 Feb
6	Reviu DAK fisik Bid. Kesehatan subbid rujukan dan farmasi	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-3					Tinggi	Irban III	1 s/d 5 Feb
7	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Ujung Batu Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-2				-	Tinggi	Irban IV	3 s/d 9 Feb
8	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Sungai Riam 1 Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-2	Februari minggu ke-3				-	Tinggi	Irban I	8 s/d 13 Feb
9	Reviu DAK fisik Bid. Perumahan	Assurance	DPRKPLH	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 2 AT	5	Februari minggu ke-2	Februari minggu ke-3					Tinggi	Irban I	15 s/d 19 Feb
10	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Angsau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-2	Februari minggu ke-4					Tinggi	Irban III	8 s/d 15 Feb
11	Pemeriksaan khusus disiplin ASN	Assurance	Bapenda	Audit tujuan tertentu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 3 AT	5	Februari minggu ke-2	Maret minggu ke-1					Tinggi	Irban IV	9 feb s/d 5 maret
12	Reviu DAK fisik Bid. Pendidikan subbid SD dan SMP	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, PT, 1 KT, 2 AT	6	Februari minggu ke-2	Februari minggu ke-3					Tinggi	Irban IV	11 s/d 19 Feb
13	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 3 Sungai Riam 1 Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-3	Februari minggu ke-4					Tinggi	Irban I	15 s/d 19 Feb

14	Audit Pelaksanaan vaksinasi Covid-19	Assurance	Dinas Kesehatan	Audit Kinerja	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	12	Februari minggu ke-3	Februari minggu ke-4						Tinggi	Irban II	15 s/d 27 Feb
15	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Pangung Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-3	Maret minggu ke-1				-		Tinggi	Irban III	16 s/d 22 Feb
16	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDNKampung Baru 1 Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-4	Februari minggu ke-5				-		Tinggi	Irban I	22 s/d 26 Feb
17	Audit investigasi (audit pendahuluan)	Assurance	Ds. Damit Hulu Kec. Batu Ampar	Audit Investigasi	2018 - 2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT	4	Februari minggu ke-4	Februari minggu ke-4	4	9	90.000	3.240.000		Tinggi	Irban III	23 s/d 26 Feb
18	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 4 Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Februari minggu ke-4	Maret minggu ke-1				-		Tinggi	Irban III	23 Feb s/d 1 Maret
19	Audit Dana BOS	Assurance	SMPN 6 Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Februari minggu ke-4	Maret minggu ke-1				-		Tinggi	Irban IV	22 s/d 26 Feb
20	Reviu LKPD	Assurance	Pemda	Reviu	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	16	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-4						Tinggi	Tim Gabungan	1 s/d 23 Maret
21	Reviu LapKin	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	16	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-4						Tinggi	Tim Gabungan	1 s/d 23 Maret
22	Reviu LPPD	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	16	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-4						Tinggi	Tim Gabungan	1 s/d 23 Maret
23	Probity audit	Assurance	DPUPRP	Audit tujuan tertentu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 9 AT	132	Maret minggu ke-4	Oktober minggu ke-4						Tinggi	Irban I	22 Maret s/d 7 Okt
24	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Kali besar Kec. Kurau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Maret minggu ke-4	April minggu ke-2	5	8	120.000	4.800.000		Tinggi	Irban I	24 Maret s/d 5 April
25	Audit Investigasi	Assurance	PKM Angsau	Audit Investigasi		1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	34	Maret minggu ke-4	Mei minggu ke-2						Tinggi	Irban II	24 maret s/d 11 mei
26	Audit Investigasi (audit rinci)	Assurance	Ds. Damit Hulu Kec. Batu Ampar	Audit Investigasi	2018 - 2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT	21	Maret minggu ke-4	April minggu ke-4	5	9	90.000	4.050.000		Tinggi	Irban III	24 Maret s/d 22 April
27	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT	5	Maret minggu ke-4	April minggu ke-1	3	9	90.000	2.430.000		Tinggi	Irban III	25 Maret s/d 1 April
28	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN sarang halang	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Maret minggu ke-4	April minggu ke-1						Tinggi	Irban IV	23 s/d 29 Maret
29	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Sumber Mulya Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Maret minggu ke-5	April minggu ke-1				-		Tinggi	Irban IV	30 Maret s/d 6 April
30	Pendampingan RB dan ZI	Consulting	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	15	April minggu ke-1	April minggu ke-3						Tinggi	Semua Irban	1 s/d 22 April
31	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Telaga	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	April minggu ke-1	April minggu ke-2				-		Tinggi	Irban IV	7 s/d 13 April
32	Evaluasi RB dan ZI	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	6	April minggu ke-4	April minggu ke-5						Tinggi	Semua Irban	23 s/d 30 April

33	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Tanjung Kec. Bajuin	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Mei minggu ke-1	Mei minggu ke- 3	3	8	75.000	1.800.000	Tinggi	Irban I	3 s/d 7 Mei
34	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Simpang Empat Sungai Biru Kec. Jorong	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Mei minggu ke-1	Juni minggu ke- 1	5	8	130.000	5.200.000	Tinggi	Irban I	25 Mei s/d 7 Juni
35	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Pantai Linuh Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Mei minggu ke-1	Mei minggu ke-3	5	9	90.000	4.050.000	Tinggi	Irban III	3 s/d 20 Mei
36	Post audit BTT	Assurance	BPBD	Audit tujuan tertentu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	17	Mei minggu ke-1	Juni minggu ke-1					Tinggi	Irban IV	3 s/d 28 Mei
37	Reviu rancangan RKPD tahun 2022	Assurance	Pemda	Reviu	2022	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	12	Mei minggu ke-2	Mei minggu ke-4					Tinggi	Irban IV	10 s/d 28 Mei
38	Pendampingan SAKIP	Consulting	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	7	Mei minggu ke-3	Mei minggu ke- 4					Tinggi	Semua Irban	20 s/d 31 Mei
39	Evaluasi SAKIP	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2020	PJ, WPJ, PT, KT, AT	10	Juni minggu ke- 1	Juni minggu ke- 3					Tinggi	Semua Irban	1 s/d 14 Juni
40	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Sungai Bakar Kec. Bajuin	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Juni minggu ke- 1	Juni minggu ke- 2	5	8	75.000	3.000.000	Tinggi	Irban I	8 s/d 17 Juni
41	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Bawah Layung Kec. Kurau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Juni minggu ke- 2	Juni minggu ke- 3	3	8	120.000	2.880.000	Tinggi	Irban I	10 s/d 24 Juni
42	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Juni minggu ke-3	Juni minggu ke-5	3	9	90.000	2.430.000	Tinggi	Irban III	18 s/d 24 Juni
43	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Sungai Riam Kec. Pelahari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	8	Juni minggu ke-3	Juni minggu ke-4				-	Tinggi	Irban II	15 s/d 24 Juni
44	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 4 Bati-bati	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Juni minggu ke-3	Juni minggu ke-4	3	8	130.000	3.120.000	Tinggi	Irban IV	15 s/d 21 Juni
45	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 1 Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Juni minggu ke-4	Juli minggu ke-1	3	9	90.000	2.430.000	Tinggi	Irban III	25 Juni s/d 1 Juli
46	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Bentok Darat 1	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Juni minggu ke-4	Juli minggu ke- 1	3	8	130.000	3.120.000	Tinggi	Irban IV	22 s/d 28 Juni
47	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPNTakisung	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Juni minggu ke-5	Juli minggu ke- 2	3	8	90.000	2.160.000	Tinggi	Irban IV	29 Juni s/d 5 Juli
48	Audit dana penanggulangan bencana	Assurance	DPUPRP	Audit tujuan tertentu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	30	Juli minggu ke- 1	Agustus minggu ke-4					Tinggi	Irban I	2 Juli s/d 31 Agustus
49	Maturitas SPIP	Consulting	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	10	Juli minggu ke-1	Juli minggu ke-3					Tinggi	Semua Irban	2 s/d 15 Juli
50	Probitas audit	Assurance	DPRKPLH	Audit tujuan tertentu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	84	Juli minggu ke-1	Oktober minggu ke-1					Tinggi	Irban IV	1 Juli s/d 29 Okt
51	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 2 Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Juli minggu ke-2	Juli minggu ke-3	3	9	90.000	2.430.000	Tinggi	Irban III	16 s/d 23 Juli

52	Reviu Rancangan RKPD Perubahan tahun 2021	Assurance	Pemda	Reviu	2021	PJ, WPJ, PT, KT, AT	8	Juli minggu ke- 3	Juli minggu ke- 4						Tinggi	Irban II	12 s/d 22 Juli
53	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMP Negeri Tambang Ulang	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Juli minggu ke- 3	Agustus minggu ke-1	3	8	105.000	2.520.000		Tinggi	Irban IV	21 s/d 27 Juli
54	Reviu DAK Fisik reguler	Assurance	Dinas Kesehatan Bid. Pelayanan dasar & Bid. Pelayanan rujukan	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	6	Juli minggu ke- 4	Juli minggu ke- 5						Tinggi	Irban II	23 s/d 30 Juli
55	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Martadah Kec. Tambang Ulang	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	Juli minggu ke- 4	Agustus minggu ke-2	3	8	105.000	2.520.000		Tinggi	Irban IV	21 Juli s/d 3 Agt
56	Reviu rancangan KUPA dan PPAS 2021	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	7	Agustus minggu ke-1	Agustus minggu ke-3						Tinggi	Irban I	5 s/d 16 Agt
57	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Kandangan Kec. Panyipatan	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	8	Agustus minggu ke-1	Agustus minggu ke-2	5	8	120.000	4.800.000		Tinggi	Irban II	2 s/d 12 Agt
58	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Telaga Langsung Kec. Takisung	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	8	Agustus minggu ke-1	Agustus minggu ke-3	5	8	90.000	3.600.000		Tinggi	Irban IV	4 s/d 16 Agt
59	Reviu DAK Fisik reguler	Assurance	Dinas Kesehatan Bid. Pelayanan kefarmasian	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	6	Agustus minggu ke-2	Agustus minggu ke-3						Tinggi	Irban II	13 s/d 20 Agt
60	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Telaga Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/ Operasional	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Agustus minggu ke-2	Agustus minggu ke-3				-		Tinggi	Irban III	2 s/d 12 Agt
61	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 4 Angsau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Agustus minggu ke-3	Agustus minggu ke-3						Tinggi	Irban III	13 s/d 20 Agt
62	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Tambang Ulang	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	8	Agustus minggu ke-3	September minggu ke-1	5	8	105.000	4.200.000		Tinggi	Irban IV	18 s/d 27 Agt
63	Audit kepatuhan pengelolaan BMD	Assurance	BPKAD	Audit tujuan tertentu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	22	Agustus minggu ke-4	September minggu ke-4						Tinggi	Irban II	23 Agt s/d 21 Sept
64	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Karang Taruna	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Agustus minggu ke-4	September minggu ke-1						Tinggi	Irban III	23 s/d 27 Agt
65	Reviu rancangan KUA PPAS 2022	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2022	PJ, WPJ, PT, KT, AT	7	September minggu ke-1	September minggu ke-2						Tinggi	Irban III	30 Agt s/d 7 Spet
66	Narasumber untuk pengawasan desa dan sekolah	Consulting	Desa dan sekolah	Pengawasan lainnya	2021			September	September							Irban III	
67	Narasumber untuk pengawasan desa dan sekolah	Consulting	Desa dan sekolah	Pengawasan lainnya	2021			September	September							Irban IV	
68	Reviu RKA Perubahan 2021	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	7	September minggu ke-1	September minggu ke-2						Tinggi	Semua Irban	1 s/d 9 Sept

69	Audit Kepegawaian	Assurance	BKPSDM	Audit Kinerja	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 6 AT	30	September minggu ke-1	Nopember minggu ke-4						Tinggi	Irban I	1 Sept s/d 2 Nop
70	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Ujung Kec. Bati-bati	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	8	September minggu ke-3	September minggu ke-4						Tinggi	Irban IV	14 s/d 23 Sept
71	Reviu RKA 2022	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2022	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	7	September minggu ke-4	September minggu ke-5						Tinggi	Semua Irban	22 s/d 30 Sept
72	Reviu Dana BOS kinerja dan afirmasi	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	September minggu ke-5	Oktober minggu ke-2						Tinggi	Irban III	28 Sept s/d 4 Okt
73	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Kintapura Kec. Kintap	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	8	Oktober minggu ke-1	Oktober minggu ke-3	5	8	150.000	6.000.000		Tinggi	Irban II	1 s/d 12 Okt
74	Audit Kinerja	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit kinerja	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	23	Oktober minggu ke-2	Nopember minggu ke-2						Tinggi	Irban III	5 Okt s/d 5 Nop
75	Reviu DAK fisik reguler & penugasan	Assurance	KB Bid. KB & Bid. Penguatan intervensi stunting	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Oktober minggu ke-3	Oktober minggu ke-4						Tinggi	Irban II	13 s/d 20 Okt
76	Verifikasi LHKASN	Assurance	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	7	Oktober minggu ke-2	Oktober minggu ke-3						Tinggi	Semua Irban	13 s/d 22 Okt
77	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 3 Angsau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Oktober minggu ke-4	Oktober minggu ke-5						Tinggi	Irban II	21 s/d 27 Okt
78	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 6 Angsau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT		Oktober minggu ke-5	Nopember minggu ke-1						Tinggi	Irban II	28 Okt s/d 3 Nop
79	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 2 Jorong	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-1	Nopember minggu ke-2	3	8	130.000	3.120.000		Tinggi	Irban I	3 s/d 9 Nop
80	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Ambungan	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT		Nopember minggu ke-1	Nopember minggu ke-2				-		Tinggi	Irban II	4 s/d 10 Nop
81	Audit investigasi	Assurance	Ds. Sambangan Kec. Bati-bati	Audit tujuan tertentu	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	30	Nopember minggu ke-1	Desember minggu ke-2	5	8	130.000	5.200.000		Tinggi	Irban IV	1 Nop s/d 10 Des
82	Reviu DAK PUPRP	Assurance	DPUPRP	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT	20	Nopember minggu ke-2	Desember minggu ke-3						Tinggi	Irban I	15 Nop s/d 10 Des
83	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 1 Kurau	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-2	Nopember minggu ke-3	3	8	120.000	2.880.000		Tinggi	Irban I	10 s/d 24 Nop
84	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Atu-atu	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Nopember minggu ke-2	Nopember minggu ke-3						Tinggi	Irban II	11 s/d 17 Nop
85	Reviu DAK Fisik Bid. Pasar	Assurance	Dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-2	Nopember minggu ke-3						Tinggi	Irban III	8 s/d 12 Nop
86	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 3 Pelahhari	Audit Kinerja/ Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Nopember minggu ke-3	Nopember minggu ke-4						Tinggi	Irban II	18 s/d 24 Nop
87	Reviu DAK fisik Bid. Pendidikan SKB	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-3	Nopember minggu ke-4						Tinggi	Irban III	15 s/d 19 Nop
88	Audit penyelenggaraan pemerintahan desa	Assurance	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja/ Operasional	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	8	Nopember minggu ke-3	Nopember minggu ke-4	5	9	90.000	4.050.000		Tinggi	Irban III	15 s/d 24 Nop

89	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMP 1 Panyipatan	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Nopember minggu ke-4	Desember minggu ke-1	3	8	120.000	2.880.000	Tinggi	Irban II	25 Nop s/d 1 Des
90	Reviu DAK fisik pendidikan Bid. SD dan SMP	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-4	Nopember minggu ke-5					Tinggi	Irban III	22 s/d 26 Nop
91	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 3 Asam-asam Kec. Jorong	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Nopember minggu ke-4	Desember minggu ke-1	3	8	130.000	3.120.000	Tinggi	Irban I	25 Nop s/d 6 Des
92	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 2 Pelaihari	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Desember minggu ke-1	Desember minggu ke-2					Tinggi	Irban I	7 s/d 13 Des
93	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Batakan	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT		Desember minggu ke-1	Desember minggu ke-2	3	8	120.000	2.880.000	Tinggi	Irban II	2 s/d 8 Des
94	Audit Kepatuhan pengadaan barang/jasa	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	21	Desember minggu ke-1	Desember minggu ke-5					Tinggi	Irban III	29 Nop s/d 29 Des
95	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Pangung Kec. Pelaihari	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT	5	Desember minggu ke-2	Desember minggu ke-4					Tinggi	Irban I	14 s/d 20 Des
96	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SMPN 2 Kintap	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Desember minggu ke-2	Desember minggu ke-3	3	8	150.000	3.600.000	Tinggi	Irban II	9 s/d 15 Des
97	Reviu DAK Fisik	Assurance	DPRKPLH, Distanhorbun	Reviu	2021	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	8	Desember minggu ke-2	Desember minggu ke-3					Tinggi	Irban IV	7 s/d 15 Des
98	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 1 Kintapura	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Desember minggu ke-3	Desember minggu ke-4	3	8	150.000	3.600.000	Tinggi	Irban II	16 s/d 22 Des
99	Audit PKKN	Assurance	Ds. Sambangan Kec. Bati-bati	Audit tujuan tertentu	2019	1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	13	Desember minggu ke-3	Desember minggu ke-4	5	8	130.000	5.200.000	Tinggi	Irban IV	13 s/d 29 Des
100	Audit Dana BOS	Assurance	UPTD SDN 2 Pandansari	Audit Kinerja/Operasional	2020	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT	5	Desember minggu ke-4	Desember minggu ke-5	3	8	150.000	3.600.000	Tinggi	Irban II	23 s/d 29 Des
101	Penyusunan PKPT		Inspektorat	Perencanaan	2022			Desember minggu ke-4	Desember minggu ke-5					Tinggi	Semua Irban	20 s/d 24 Des
102	Penutupan Kas	Assurance	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2021	PJ, WPJ, PT, KT, AT	2	Desember minggu ke-5	Desember minggu ke-5					Tinggi	semua Irban	30 s/d 31 Des

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*Alfiri*

ALFIRIAL, S.H., MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA